



**Judul** : Panja reformasi Polri, tunggakan perkara jadi PR terbesarnya  
**Tanggal** : Minggu, 11 Januari 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Panja Reformasi Polri Tunggakan Perkara Jadi PR Terbesarnya

ANGGOTA Komisi III DPR Hinca Panjaitan menyoroti tugas non-fungsi utama (non-tusi) Polri yang kini makin krusial, salah satunya dalam menjaga rantai pasok pangan. Kehadiran polisi sangat dibutuhkan negara untuk memastikan distribusi pupuk dan hasil panen tidak terhambat praktik ilegal.

Hinca menilai, keterlibatan Polri di sektor tersebut tidak bisa dilepaskan dari upaya menjaga kedaulatan pangan nasional. Pasalnya, tantangan utama berada pada mata rantai ketahanan pangan, mulai dari distribusi pupuk yang kerap menyimpang hingga penyaluran hasil panen yang melawan hukum, sehingga membutuhkan kehadiran negara.

"Di situ masuk polisi. Seolah dia non-tusi, tapi ternyata tusinya karena memang menyangkut soal nasional," ujar Hinca dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Reformasi Polri, Kejaksaan dan Pengadilan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Selain itu, Hinca juga mengingatkan pentingnya modernisasi penegakan hukum melalui penguatan scientific crime investigation. Diharapkan, peran Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) dan Kedokteran Kepolisian (Dokkes) lebih diperhatikan dan diperkuat integritasnya dalam reformasi budaya Polri.

"Peradilan pidana modern membutuhkan dukungan data ilmiah yang jernih agar penanganan perkara lebih akuntabel," ucap politikus Partai Demokrat itu.

Hinca juga mengingatkan agar Polri segera menuntaskan tunggakan perkara (case backlog) yang kerap dikeluhkan masyarakat. Tidak ada lagi istilah kasus yang "berulang tahun" hingga bertahun-tahun tanpa adanya kepastian hukum. "Bahkan hingga tersangkanya meninggal dunia namun status hukumnya masih menggantung," ucap legislator Dapil Sumut II itu.

Terkait penuntasan perkara, dia mengaku mendapatkan data dari kantor polisi mulai dari level Polsek, Polres, Polda hingga Mabes Polri. Dan, masih banyak jumlah perkara yang masuk namun tidak dapat diselesaikan tepat waktu. "Banyak yang ulang tahun perkara itu. Reformasi kultural ini PR besar yang harus kita selesaikan," tegasnya.

Anggota Komisi III DPR Martin D Tumbelaka menambahkan, reformasi di tubuh Polri perlu diarahkan pada penguatan sistem pengawasan internal. Pengawasan internal memegang peranan krusial dalam menjaga dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Menurut Martin, secara struktural, organisasi Polri sebenarnya telah memiliki perangkat yang lengkap, termasuk mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Namun, tantangan utama terletak pada efektivitas pelaksanaan pengawasan internal itu sendiri.

Martin menilai, fungsi Profesi dan Pengamanan (Propam) memiliki peran strategis dalam menjaga marwah dan kredibilitas Polri. ■ PYB